

KRISIS LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH DAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL PERAN MANUSIA DALAM MERUSAK ALAM

Genopepa Sedia^{1*}

^{1*} Genopepa Sedia; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas, Sintang, Indonesia, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: geno.vis99@gmail.com

* Penulis Korespondensi: geno.vis99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 6 Maret 2025
Direvisi: 20 Agustus 2025
Diterima: 5 September 2025
Diterbitkan: 30 September 2025

Keywords:

Environmental defenders, Natural resource exploitation; Sustainable development.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1491>

Abstract

This research aims to identify the factors that cause the low level of safety of environmental defenders in Indonesia, as well as exploring the negative impacts of natural damage on communities and ecosystems. Apart from that, this research also provides an overview of the social, political and economic challenges faced by environmental defenders in the context of fighting against activities that destroy nature, as well as how policies and regulations related to the protection of environmental defenders need to be improved. The natural damage that occurs in Indonesia is greatly influenced by unsustainable natural resource exploitation practices, such as illegal mining, land clearing for plantations, and industrial activities that pollute the environment. However, environmental defenders who try to stop this destruction often face high risks, including legal and physical threats from parties who have an interest in destroying nature. In many cases, environmental defenders are often blamed or falsely accused, as well as persecuted or killed by parties who feel threatened by their cause.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Peran manusia dalam merusak alam adalah topik yang sangat luas dan relevan dengan banyak aspek kehidupan modern. Seiring berkembangnya peradaban, manusia semakin

bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sumber daya alam, makanan, air bersih, dan udara. Namun, aktivitas manusia yang tidak terkendali seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan berkelanjutan. Ini bisa terjadi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, serta penggunaan teknologi dan industri yang mencemari bumi. Kerusakan alam ini tidak hanya berpengaruh pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga pada kualitas hidup manusia. Misalnya, polusi udara dan air yang disebabkan oleh limbah industri dapat menyebabkan penyakit, perubahan iklim, dan berkurangnya biodiversitas yang mendalam.

Kerusakan alam ini seringkali bersifat jangka panjang dan bisa mengancam keberlanjutan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya di bumi. Secara lebih spesifik, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat dilihat dalam beberapa bentuk yang paling mencolok, antara lain Pencemaran Lingkungan (Polusi) Pencemaran udara, air, dan tanah adalah akibat langsung dari aktivitas manusia, terutama dari sektor industri, pertanian, dan transportasi. Di kota-kota besar, asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri menyumbang besar pada polusi udara, yang berkontribusi pada pemanasan global dan masalah kesehatan masyarakat. Sementara itu, pencemaran air terjadi melalui pembuangan limbah kimia, plastik, dan bahan-bahan berbahaya lainnya ke sungai dan laut. Hal ini mengancam ekosistem akuatik dan sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia.

Deforestasi (Penggundulan Hutan) Aktivitas penebangan hutan untuk pertanian, perkebunan (seperti kelapa sawit), dan pemukiman manusia merupakan salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Deforestasi tidak hanya mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida (CO₂), tetapi juga menghancurkan habitat satwa liar, mengurangi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan erosi tanah.¹

Selain itu, hutan yang hilang juga berperan penting dalam pengaturan iklim global, sehingga kehilangan hutan berkontribusi pada perubahan iklim yang semakin cepat. Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining) Salah satu contoh kerusakan alam yang parah akibat aktivitas manusia adalah penambangan emas tanpa izin atau penambangan ilegal. Proses penambangan ini sering menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.

¹ Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Chelsea Green Publishing.

Merkuri yang digunakan ini mencemari tanah, air, dan udara, serta menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem sekitar. Selain itu, penambangan ilegal sering kali dilakukan dengan cara yang merusak struktur geologi dan mempercepat terjadinya tanah longsor. Dalam jangka panjang, aktivitas ini menurunkan kualitas tanah dan mengancam ketahanan pangan. Pembuangan Sampah yang Tidak Terkelola dengan Baik Sampah plastik yang dibuang sembarangan menjadi salah satu masalah lingkungan global yang semakin memburuk.

Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan selama itu, sampah plastik mencemari lautan dan daratan. Ini mengancam kehidupan laut seperti ikan dan burung yang dapat terjatoh atau menelan plastik, serta mengganggu kesehatan manusia melalui rantai makanan.² Kurangnya pengelolaan sampah yang baik, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun pemerintah, memperburuk keadaan. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Perubahan iklim adalah salah satu dampak besar dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam.

Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrous oxide (N₂O), yang memerangkap panas di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Pemanasan global ini berdampak pada cuaca ekstrem, peningkatan permukaan air laut, serta gangguan pada pola cuaca yang berdampak pada pertanian dan keberlangsungan hidup makhluk hidup.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif akan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang yang mengatur tentang Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga akan mengkaji teori-teori hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Manusia terus-menerus menggali, menebang, dan mengambil segala bentuk kekayaan alam tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya sendiri.⁴

² Jackson, R. B., et al. (2001). Environmental Impacts of Shale Gas Development in the United States.

³ Sengupta, S. (2020). The Disaster of Human Impact on Nature. The New York Times.

⁴ Ehrlich, P. R., & Ehrlich, A. H. (1990). The Population Explosion. Simon and Schuster.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deforestasi merupakan masalah utama yang mempengaruhi kelestarian alam Indonesia. Menurut Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 3 juta hektar hutan pada tahun 2019, sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan perkebunan, dan pertambangan. Kebakaran hutan, yang sering kali digunakan sebagai metode pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian lainnya, juga berkontribusi besar terhadap kerusakan ini. Kehilangan hutan tropis ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia adalah rumah bagi banyak spesies endemik, seperti orangutan, harimau sumatera, dan gajah sumatera, yang kini terancam punah karena kerusakan habitat mereka. Selain itu, hilangnya hutan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim.

Ancaman terhadap Pembela Lingkungan di Indonesia oleh sebab itu Meskipun kerusakan alam semakin parah, Indonesia menghadapi krisis dalam hal perlindungan pembela lingkungan. Aktivis dan pembela hak asasi manusia (HAM) yang berjuang untuk keberlanjutan alam sering kali menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan mereka.

- a. Kriminalisasi Pembela Lingkungan merupakan Salah satu tantangan terbesar bagi pembela lingkungan di Indonesia adalah kriminalisasi. Banyak aktivis lingkungan yang terlibat dalam protes terhadap kerusakan alam atau pembangunan yang tidak berkelanjutan dijerat dengan tuduhan kriminal yang tidak berdasar. Mereka bisa dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, seperti penyerangan terhadap fasilitas atau ancaman terhadap keamanan negara, hanya karena berusaha mengungkapkan ketidakadilan atau melawan kebijakan yang merusak alam. Sebagai contoh, beberapa aktivis yang berjuang melawan perusakan hutan atau pertambangan ilegal di Kalimantan dan Sumatra pernah dijerat dengan tuduhan terorisme atau pencemaran nama baik, meskipun mereka hanya menyuarakan pendapat dan perjuangan mereka untuk melindungi alam. Kriminalisasi ini bukan hanya menghukum para pembela lingkungan, tetapi juga memberi pesan kepada masyarakat bahwa perjuangan untuk lingkungan akan selalu menghadapi ancaman hukum yang serius.
- b. Penganiayaan dan Kekerasan Fisik di mana Aktivis dan pembela lingkungan sering kali juga menjadi korban penganiayaan fisik dan ancaman kekerasan. Ini sebagian besar disebabkan oleh konflik kepentingan antara perusahaan besar yang melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat atau aktivis yang berusaha mencegah perusakan alam.

Para pembela lingkungan yang berusaha mengungkapkan kebohongan atau ketidakadilan dalam proyek-proyek besar seringkali dipukuli, diteror, atau bahkan dibunuh. Contoh nyata dari hal ini adalah pembunuhan terhadap beberapa pembela lingkungan di Kalimantan yang terlibat dalam memerangi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat adat. Kasus-kasus seperti ini sering kali tidak ditangani secara transparan oleh pihak berwenang, yang menyebabkan banyaknya impunitas bagi pelaku kekerasan.

- c. **Pembunuhan Pembela Lingkungan**, Dalam beberapa kasus, ancaman terhadap pembela lingkungan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga sampai pada pembunuhan. Aktivis yang berjuang melawan kerusakan alam, seperti penebangan liar atau pembukaan lahan untuk pertambangan, sering kali dibunuh dalam upaya untuk menghentikan perjuangan mereka. Pembunuhan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam dengan aktivitas para pembela lingkungan yang berusaha memperjuangkan kelestarian alam. Namun, sering kali para pelaku pembunuhan tidak dihukum atau bahkan diadili, yang memperburuk budaya impunitas di Indonesia. Banyak pembela lingkungan yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah atau aparat hukum, sehingga mereka cenderung bekerja dalam keadaan terancam dan dengan risiko yang sangat tinggi.
- d. **Lemahnya Perlindungan Hukum**, Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, dalam praktiknya banyak pembela lingkungan yang justru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Proses hukum yang tidak transparan dan adanya intervensi politik atau kepentingan bisnis dalam penegakan hukum memperburuk kondisi ini. Pembela lingkungan yang terancam sering kali tidak mendapatkan akses terhadap keadilan atau bantuan hukum yang cukup. Hal ini menyebabkan mereka merasa terisolasi dan rentan, serta sering kali harus melawan keuntungan ekonomi yang sangat besar yang dimiliki oleh pihak yang merusak alam, baik itu perusahaan besar atau kelompok yang terkait dengan praktik korupsi.

Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia, termasuk deforestasi, pencemaran, dan konversi lahan, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dan sering kali berkonflik dengan kepentingan lingkungan. Namun, pembela lingkungan yang berusaha untuk mengungkapkan dan menghentikan praktik-praktik perusakan ini

sering kali menjadi sasaran utama bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh perusakan alam tersebut.

Pembela lingkungan sering kali menjadi pionir dalam upaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, namun mereka juga sering menghadapi risiko yang sangat tinggi, mulai dari kriminalisasi hingga pembunuhan, karena mereka menghalangi proyek yang menguntungkan pihak-pihak yang merusak alam. Maka Kerusakan lingkungan di Indonesia, yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan manusia dalam merusak ekosistem. Namun, para pembela lingkungan yang berjuang untuk mengubah situasi ini tidak hanya harus menghadapi perusakan alam, tetapi juga harus berjuang melawan ancaman kriminalisasi, penganiayaan, dan pembunuhan yang terus meningkat.

Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif dan keamanan yang memadai, perjuangan untuk lingkungan di Indonesia tetap akan berhadapan dengan tantangan besar yang tidak hanya membahayakan alam, tetapi juga keselamatan para pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pembela lingkungan di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, namun sebagian besar terikat oleh keterhubungan langsung dengan alam dan kepentingan komunitas mereka. Berikut adalah beberapa profil yang umum ditemukan di Indonesia.

a. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Salah satu kelompok yang paling aktif dalam perjuangan untuk melindungi alam adalah masyarakat adat dan komunitas lokal. Kelompok-kelompok ini memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan alam karena hidup mereka bergantung pada sumber daya alam, baik itu hutan, tanah, atau perairan. Mereka juga sering kali memiliki pengetahuan lokal yang sangat bernilai terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Namun, banyak masyarakat adat yang menghadapi ancaman ketika hak atas tanah mereka diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Sebagai contoh, di Kalimantan dan Papua, banyak masyarakat adat yang berjuang untuk mempertahankan hutan dan tanah adat mereka, yang terancam oleh aktivitas ilegal dan perambahan oleh korporasi besar.

b. Aktivis Lingkungan dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Selain masyarakat adat, aktivis lingkungan dan organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam mengedukasi publik, melakukan advokasi kebijakan, serta

menyuarakan keprihatinan terkait kerusakan alam. NGO dan aktivis ini seringkali menjadi pihak yang pertama mengungkapkan praktik-praktik tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti yang terkait dengan industri kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga sering kali terlibat dalam litigasi publik, yakni menggunakan jalur hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap pemerintah atau perusahaan yang merusak lingkungan. Beberapa contoh organisasi yang bekerja di Indonesia antara lain Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan LSP2 (Lembaga Studi Perkebunan dan Pertanian).

c. Jurnalis Lingkungan

Jurnalis yang meliput isu-isu lingkungan juga termasuk dalam kelompok pembela lingkungan yang tidak kalah pentingnya. Mereka berfungsi untuk mengedukasi publik melalui pemberitaan yang mengangkat kasus-kasus kerusakan alam dan ketidakadilan lingkungan. Jurnalis lingkungan sering menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas mereka, termasuk ancaman fisik dan hukum.

Impunitas dan Lemahnya Penegakan Hukum adalah Salah satu faktor yang memperburuk ancaman terhadap pembela lingkungan adalah adanya impunitas yang meluas, di mana pelaku kekerasan terhadap pembela lingkungan sering kali tidak dihukum atau diadili secara adil. Banyak kasus kekerasan, baik berupa penganiayaan maupun pembunuhan, yang tidak mendapat perhatian yang layak dari aparat penegak hukum, atau bahkan didorong oleh kepentingan politik atau ekonomi yang melibatkan perusahaan besar atau pihak-pihak yang berkuasa.

Masyarakat dan pembela lingkungan sering kali merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan, karena banyaknya kasus yang tidak pernah dituntaskan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan pembela lingkungan, yang merasa bahwa nyawa dan hak mereka tidak dilindungi oleh negara. Dengan demikian Pembela lingkungan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi alam dan hak-hak masyarakat lokal, namun mereka sering kali harus menghadapi ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan mereka. Ancaman tersebut meliputi kriminalisasi, penganiayaan, dan pembunuhan, yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan alam, baik itu perusahaan besar, pemerintah, maupun individu-individu yang berkepentingan dengan eksploitasi alam. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, serta penegakan hukum yang adil dan transparan, pembela lingkungan di Indonesia akan terus berada dalam

posisi rentan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perjuangan mereka dalam menjaga keberlanjutan alam dan keadilan sosial tidak terhambat oleh ancaman dan intimidasi.

Kerusakan alam di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi, penambangan ilegal, dan perusakan ekosistem, telah membawa dampak sosial dan lingkungan yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh masyarakat lokal, serta pembela lingkungan yang berjuang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks ini, tingkat keselamatan pembela lingkungan yang terancam oleh kriminalisasi, penganiayaan, dan pembunuhan menjadi sangat relevan, karena mereka sering kali menjadi sasaran utama akibat perlawanan mereka terhadap praktik-praktik merusak alam yang menguntungkan segelintir pihak. Dalam penelitian ini, dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan alam di Indonesia dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan ancaman terhadap pembela lingkungan yang berjuang untuk melawan perusakan alam.

Para pembela lingkungan, yang sering kali terdiri dari aktivis, pemerhati lingkungan, serta masyarakat adat, menjadi korban perundungan dan tindakan represif karena perjuangan mereka. Dampak ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sosial dan lingkungan, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada di tingkat akar rumput. Di bawah ini, akan dijelaskan dampak sosial dan lingkungan yang lebih mendalam. Salah satu dampak sosial yang sangat merusak akibat kerusakan alam adalah konflik agraria yang melibatkan perampasan tanah dari masyarakat adat atau petani kecil. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur sering kali melibatkan pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil.

Keputusan ini mengarah pada pengusiran paksa terhadap masyarakat adat yang tidak memiliki akses hukum yang kuat untuk membela tanah mereka. Kerusakan alam yang disertai dengan perampasan tanah menciptakan ketegangan yang mendalam di antara masyarakat lokal dan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti perusahaan besar yang mendukung eksploitasi alam. Masyarakat yang terdampak sering kali terpaksa kehilangan akses mereka terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan

hidup mereka. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan ketegangan yang bisa berkembang menjadi konflik terbuka antara pihak yang terlibat.

Pembela hak tanah dan lingkungan seringkali menjadi korban dari kriminalisasi atau bahkan penganiayaan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh perlawanan mereka. Dalam banyak kasus, upaya pembela lingkungan untuk mempertahankan hak tanah adat dihadapkan dengan ancaman penangkapan atau tuduhan palsu, yang semakin memperburuk ketegangan sosial. Kerusakan alam yang berkelanjutan di Indonesia memiliki dampak besar terhadap keanekaragaman hayati negara ini. Deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies yang endemik.

Indonesia, yang dikenal memiliki hutan tropis terbesar di dunia, kini menghadapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Spesies seperti orangutan, harimau Sumatra, dan gajah Sumatra semakin terancam punah akibat kerusakan habitat mereka. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa deforestasi besar-besaran dan perusakan hutan telah menyebabkan penurunan populasi spesies-spesies langka yang bergantung pada hutan sebagai habitat mereka. Hal ini tidak hanya mengancam spesies tersebut, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas hidup manusia. Keanekaragaman hayati yang hilang juga mengancam keberlanjutan ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Penurunan kualitas air, kerusakan tanah akibat erosi, dan perubahan iklim adalah beberapa dampak yang muncul akibat berkurangnya hutan tropis dan ekosistem alami.

Penguatan Perlindungan Hukum untuk Pembela Lingkungan meliputi :

- 1) Pendidikan Lingkungan yang Lebih Masif: Untuk mengurangi kerusakan alam, perlu ada program pendidikan lingkungan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam dan menghargai hak-hak pembela lingkungan.
- 2) Kampanye Kesadaran Masyarakat: Pemerintah, LSM, dan media harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan dan mendukung perjuangan pembela lingkungan. Kampanye ini bisa mencakup aspek kemampuan untuk mengenali ancaman terhadap hak asasi manusia dan bagaimana berperan aktif dalam melindungi pembela lingkungan.

3) Reformasi Kebijakan Ekonomi yang Ramah Lingkungan

- a. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Pemerintah harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memberi insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan dan meminimalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam. Dalam hal ini, sektor swasta juga perlu didorong untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi mereka.
- b. Pemberian Hak Masyarakat Lokal atas Sumber Daya Alam: Kebijakan yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan alam harus diperkuat. Dengan memberikan mereka hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka gunakan, akan tercipta keseimbangan antara keberlanjutan alam dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

4) Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Internasional

- a. Kerjasama Internasional: Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional dalam rangka memperbaiki perlindungan pembela lingkungan. Bantuan dari lembaga-lembaga internasional dapat memberikan dukungan diplomatik yang memperkuat legitimasi perlawanan terhadap kerusakan alam dan memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap pembela lingkungan.
- b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Semua proses hukum yang melibatkan pembela lingkungan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat harus diberi akses untuk memantau perkembangan kasus-kasus yang melibatkan pembela lingkungan, sehingga pembelaan terhadap hak asasi manusia bisa dilakukan secara lebih efektif. Kerusakan alam yang semakin parah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Pembela lingkungan yang berjuang untuk mencegah kerusakan ini sering kali dihadapkan dengan ancaman berat, mulai dari kriminalisasi hingga penganiayaan fisik. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih kuat bagi pembela lingkungan sangat penting.

Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi faktor penghambat. Pembela lingkungan sering kali harus berhadapan dengan proses hukum yang lambat atau bahkan tertunda. Banyak dari mereka yang menghadapi ancaman fisik atau kriminalisasi tidak mendapat dukungan hukum yang memadai atau keadilan yang mereka harapkan. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti penganiayaan terhadap pembela lingkungan,

sering kali tidak diproses secara cepat atau bahkan dilaporkan kepada pihak berwenang dengan sangat sedikit tindak lanjut. Kebanyakan proyek-proyek besar yang merusak alam, seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan deforestasi untuk pengembangan infrastruktur, sering kali melibatkan korporasi besar yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintah.

Proyek-proyek ini sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, sementara keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal dikesampingkan. Pembela lingkungan yang menentang proyek-proyek tersebut sering kali menjadi sasaran ancaman fisik dan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang ingin melindungi kepentingan ekonomi mereka. Ketidakmampuan negara untuk memisahkan kepentingan politik dan ekonomi dari perlindungan hak asasi manusia memperburuk keadaan, karena hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi pembela lingkungan yang berjuang untuk melindungi alam dan hak-hak masyarakat.

Di Indonesia, terdapat budaya kekerasan yang meluas terhadap pembela lingkungan, yang sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup tegas. Impunitas, atau ketidakadilan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap pembela lingkungan, menjadi salah satu alasan mengapa mereka terus menjadi sasaran ancaman tanpa ada konsekuensi serius bagi pelakunya. Penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada pembela lingkungan, dengan mengutamakan keberlanjutan dan perlindungan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak mengancam kelestarian alam dan hak masyarakat.

Penegakan hukum dan kebijakan perlindungan pembela lingkungan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Meskipun terdapat kebijakan dan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, implementasinya sering kali tidak efektif dan tidak konsisten. Kolusi antara pihak pemerintah dan korporasi besar, lemahnya sistem hukum, dan kurangnya perlindungan fisik membuat pembela lingkungan rentan terhadap ancaman kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, perbaikan kebijakan, dan perhatian lebih besar terhadap perlindungan pembela lingkungan agar mereka dapat terus berjuang demi keberlanjutan alam dan hak asasi manusia tanpa ancaman yang membahayakan keselamatan mereka.

Ketika pembela lingkungan dan HAM diancam, dibungkam, atau bahkan dibunuh, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka secara pribadi, tetapi juga pada upaya perlindungan lingkungan itu sendiri. Hal ini menurunkan efektivitas perlawanan terhadap perusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar dalam eksploitasi sumber daya alam.

- 1) Menghambat Gerakan Lingkungan: Ketika para aktivis terintimidasi atau dilumpuhkan, hal ini melemahkan daya dorong gerakan lingkungan yang seharusnya dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Tindakan represif ini menghalangi pembentukan kesadaran masyarakat dan mengurangi partisipasi aktif mereka dalam melawan kerusakan alam.
- 2) Terhambatnya Kebijakan Perlindungan Lingkungan: Aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ketika mereka dibungkam atau dihukum, proses advokasi kebijakan yang melibatkan perubahan regulasi untuk melindungi alam juga menjadi lebih sulit. Ini memperburuk kondisi lingkungan di Indonesia yang sudah terancam oleh berbagai bentuk perusakan.
- 3) Meningkatkan Kerusakan Alam: Ketika aktivis lingkungan dihentikan oleh kekerasan dan ancaman, perusahaan yang merusak lingkungan seringkali dapat terus beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, kerusakan alam yang lebih besar terjadi, seperti deforestasi, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang semakin memperburuk keadaan alam di Indonesia.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak pembela lingkungan dan HAM yang berkomitmen untuk melindungi alam, mereka masih menghadapi ancaman yang sangat serius, mulai dari kriminalisasi, penganiayaan, hingga pembunuhan. Ancaman-ancaman ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak besar pada perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang lestari.

Kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, penambangan ilegal, dan pembuangan limbah, sering kali dilakukan oleh perusahaan besar atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Mereka yang menentang aktivitas ini sering kali menjadi korban kekerasan dan intimidasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi ini, perlindungan terhadap pembela lingkungan dan HAM perlu diperkuat, baik melalui reformasi hukum, dukungan internasional, maupun

penegakan hukum yang adil untuk memastikan bahwa mereka yang berjuang untuk menjaga alam tidak lagi menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pembela lingkungan, serta memastikan bahwa upaya-upaya mereka untuk menjaga bumi tetap terlaksana dengan efektif.⁵

prioritas utama dalam upaya menjaga kelestarian alam. Tanpa adanya jaminan keselamatan bagi pembela lingkungan, perjuangan mereka dalam mempertahankan alam dari kerusakan akan semakin sulit.

- 1) Sistem Perlindungan yang Lebih Kuat: Perlu adanya sistem hukum yang memastikan bahwa pembela lingkungan tidak hanya mendapat perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak hukum mereka, seperti hak untuk berorganisasi, hak untuk berbicara, dan hak untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut dibungkam oleh pihak yang berkuasa. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kriminalisasi, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap aktivis lingkungan.
- 2) Penguatan Lembaga dan Kebijakan: Pemerintah perlu untuk lebih proaktif dalam melindungi para pembela lingkungan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung pemberian perlindungan hukum bagi aktivis, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan. Lembaga-lembaga internasional juga harus terlibat dalam mendukung kebijakan dan praktik yang melindungi pembela lingkungan di Indonesia.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan tingginya ancaman terhadap pembela lingkungan dan rendahnya tingkat keselamatan mereka di Indonesia, serta hubungan erat antara kerusakan alam dengan kekerasan terhadap pembela lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan hidup masih terbilang rendah, yang sering kali menyebabkan penolakan terhadap pembela lingkungan yang berusaha mengubah atau menentang kebijakan atau proyek yang merusak alam. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang peran pembela lingkungan dan pentingnya perlindungan alam harus lebih digalakkan.

⁵ John,V.W. 2013. Water Conservation and Management in the Upper Catchment of Lake Bogoria Basin. European International Journal of Science and Technology. Indrawardana,

⁶ Iskandar, J. 2014. Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. Genopepa Sedia: Krisis Lingkungan Akibat Sampah Dan Penambangan Emas Ilegal Peran Manusia Dalam Merusak Alam PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 2, September 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, E., & Lister, N. M. (2019). Illegal Mining and Environmental Degradation in Africa. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 5(1), 11-30.
- Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2002). *Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical Handbook*. SAGE.
- Cunningham, W. P., & Saigo, B. W. (2011). *Environmental Science: A Global Concern*. McGraw-Hill.
- Diamond, J. (2005). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Viking.
- Ehrlich, P. R., & Ehrlich, A. H. (1990). *The Population Explosion*. Simon and Schuster.
- Gómez, S. M., & Castro, J. R. (2015). Gold Mining and Its Environmental Impact: The Case of Small-Scale Gold Mining in Latin America. *Environmental Pollution*, 198.
- Gore, A. (2006). *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It*. Rodale.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Holt, D., & Schoenberger, L. (2002). *Mining and the Environment: From Ore to Metal*. CRC Press.
- Kinnaman, T. C. (2014). *The Economics of Recycling and Waste Management*. Routledge.
- Klein, N. (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate*. Simon & Schuster.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Chelsea Green Publishing.
- Miller, G. T. (2013). *Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions*. Brooks/Cole.
- Obeng, E. A., & Nkrumah, M. A. (2020). Environmental Degradation from Illegal Gold Mining in Ghana: Causes, Impacts, and Solutions. *Journal of Environmental Science and Engineering*, 12(3).
- Pimentel, D., et al. (1999). Economic and Environmental Impacts of Reducing U.S. Agricultural Pesticide Use. *BioScience*, 49(10), 722-730.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Smith, L. M., & Houghton, R. A. (2002). Deforestation and Its Impact on Climate Change. *Science*, 297(5580), 2079-2083.
- Tilton, J. E., & Riddell, M. (2007). *The Economics of Non-Renewable Resources*. Resources for the Future.
- UNEP (United Nations Environment Programme) (2019). *The State of the Environment: Global Impact of Mining and Waste*. UNEP.
- World Bank (2019). *The Impact of Illegal Mining on the Environment and Economy: A Global Overview*. World Bank.
- World Health Organization (WHO) (2016). *Ambient (Outdoor) Air Quality and Health*.